

Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dela Yulia

Universitas Muhammadiyah Tangerang
dellayulia85@gmail.com

Dirvi Surya Abbas

Universitas Muhammadiyah Tangerang
abbas.dirvi@gmail.com

Ahmad Jayanih

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol,
Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
Korespondensi author : abbas.dirvi@gmail.com

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of regional taxes, regional levies, and general allocation funds on the level of regional financial independence in regency and city governments in Banten Province. The research period used is 4 years, namely 2018 – 2022. The study population is all districts and cities in the Povinsi Banten region. The sampling technique was Non Probability Sampling. The type of data used is secondary data obtained from the website of the Directorate General of Financial Balance. The analysis method used is panel data regression analysis. The results showed that regional taxes had a significant positive effect on the level of regional financial independence, regional levies had a negative effect on the level of regional financial independence, and the general allocation fund had a negative and insignificant effect on the level of regional financial independence.

Keywords: Regional taxes and general allocation funds, level of regional financial independence.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Periode waktu penelitian yang digunakan adalah 4 tahun yaitu 2018 – 2022. Populasi penelitian adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Povinsi Banten. Teknik pengambilan sampel adalah *Non Probability Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Pajak daerah, dan dana alokasi umum, tingkat kemandirian keuangan daerah.

LATAR BELAKANG

Tiap daerah di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah yang resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan berlakunya Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun

2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Tiap – tiap kabupaten atau kota mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004. Tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga mampu untuk mengatur daerah masing – masing tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Panca Wahyu ningsih, 2015). Kementerian Keuangan menaksir penerimaan pemerintah kabupaten/kota dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan naik 50% setelah Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) berlaku efektif.

Dalam RUU itu, pemerintah menyederhanakan jenis PDRD untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan. Namun Sri Mulyani memastikan penyederhanaan jenis PDRD tidak akan mengurangi jumlah PDRD yang akan diterima pemda. Perubahan pengaturan pajak daerah termasuk tarif, lanjutnya, justru akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur. Salah satu bentuk penyederhanaan adalah reklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis pajak.

Sri Mulyani menyatakan hal ini dimaksudkan untuk memudahkan optimalisasi dan integrasi pemungutan, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah. Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan dana transfer kedaerah dan dana desa alias TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah. Padahal, 70 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari TKDD. Di sisi lain, Sri Mulyani menyoroti minimnya kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam tiga tahun terakhir ini, porsi PAD dalam APBD masih berkisar 24,7 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maya dan Lita, 2019) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rizka, 2016) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dian, Sri dan Siska 2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Putri Ika Sari, 2015) menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas masih terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan yang lainnya. Selain itu, untuk wilayah Provinsi Banten belum ada jurnal penelitian yang melakukan penelitian di wilayah tersebut, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut variable tersebut dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Pada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2021)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif dengan data yang diperoleh berwujud angka, skor, dan analisisnya menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya menggunakan data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif (inferensi) (ArryEksandi, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variable independen yaitu pajak daerah, dan dana alokasi umum terhadap variable dependen itu tingkat kemandirian keuangan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang memuat data – data variabel dan dapat diunduh melalui situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) <http://djpk.kemenkeu.go.id>. Data laporan yang digunakan yaitu laporan realisasi anggaran Provinsi Banten dari periode 2018-2021.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kota/kabupaten yang ada di wilayah Banten tahun yang mempublikasikan laporan realisasi anggaran selama periode 2018 – 2021, oleh Karen itu terdapat 8 Kota/Kabupaten. Adapun Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* dengan pertimbangan tertentu. Dalam Upaya mengolah data serta menarik kesimpulan maka peneliti menggunakan program Eviews 12.0, analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Pengukuran yang dilihat dari statistik deskriptik yang digunakan meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, sum dan range, untuk menentukan model regresi data panel yang tepat maka dapat menggunakan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, Uji *Lagrange Multiplier*

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Proxy dan Riset Sebelumnya	Formula
TKKD (Y)	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) adalah kemampuan opemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan -kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muliana, 2010).	$\text{TKDD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Pajak Daerah (X1)	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Muhajir, 2018).	$\text{Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Dana Alokasi Umum (X2)	Dana Alokasi Umum adalah dana transfer antar daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.(Kurnia Rina (2010).	$\text{DAU} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Analisis model regresi data panel, dengan model persamaan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- Y : Variabel Dependen
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, 2$: Koefisien regresi variabel independen
- i : Perusahaan
- t : Waktu
- ϵ : Residual / error

HASIL DAN PEMBAHASAN**HASIL****1. Analisis Deskriptif**

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Max	Min	Std.Dev	Obs
TKKD	33.13469	35.70500	52.77000	7.030000	15.43775	32
PD	24.15063	27.41500	46.55000	1.520000	15.14278	32
DAU	31.80281	33.93000	50.54000	15.52000	10.36256	32

Sumber : [Output Eviews 12.0](#)

Berdasarkan hasil analisis statistic deskriptik pada table dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan berjumlah sama yaitu 32 sample. Nilai Max menunjukkan kisaran nilai terkecil dalam penelitian. Min menunjukkan kisaran nilai terendah dalam penelitian. Nilai mean menunjukkan kisaran nilai rata-rata atau total dari masing-masing variabel dibagi jumlah sampel. Sedangkan *St.Dev* menunjukkan simpangan data yang ada dalam penelitian.

Tabel 3
Pengujian Regresi Data Panel

Effect Test	Prob > F	Det-Test	(Prob>F)/(Prob>Chibar2)/(Prob>Chi2)	Hasil
CEM	0.0000	Uji <i>Chow</i>	0.0000	FEM
FEM	0.0000	Uji <i>Hausman</i>	0.6576	REM
REM	0.0000	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	0.0000	REM

Sumber : [Output Eviews 12.0](#)

Berdasarkan pengujian, model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah REM (*Random Effect Model*). Pada *Random Effect Model* tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena *Random Effect Model* merupakan metode estimasi *Generalized Least Square* (GLS). Teknik GLS ini dipercaya mengatasi adanya autokorelasi runtun waktu (*time series*) serta korelasi antar observasi (*cross section*).

Tabel 4
Pengujian Regresi Data Panel (Random Effect Model)

Variabel	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob
C	15.62372	4.658908	3.353516	0.0023
PD	0.0856307	0.080366	10.65506	0.0000
DAU	-0.153120	0.100150	-1.528905	0.1375

Sumber : [Output Eviews 12.0](#)

Uji regresi data panel berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat yang diinterpretasikan melalui suatu persamaan yang telah dibuat.

Tabel 5
Rangkuman Hasil Penelitian

Hipotesis	T-statistic	Prob	Hasil
H₁ : Pajak Daerah miliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)	10.6605	0.0000	Diterima
H₂ : Dana Aloksi Umum tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)	-1.528905	0.1375	DiTolak
Adjusted R-Square		0.906000	
F		1005956	
Hasil analisis model regresi data panel	TKDD = 15.62372 + 0.856307PD + 1.352424RD + (-0.153120) DAU + ε		

PEMBAHASAN

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian pada tabel 4 Dari penelitian ini variabel pajak daerah memiliki nilai t-statistic 10.65506, sedangkan nilai t-tabel dengan tangka probabilitas 0,05, df (n-k) = 29 sebesar 2.0452. Dengan demikian t – statistic pajak daerah (10.65506) lebih besar dari nilai t-tabel (2.0452), yaitu $10.65506 > 2.0452$. Nilai Prob. yang dimiliki variable pajak sebesar $0.0000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD), artinya hipotesis pertama (H1) penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan (Maya dan Lita, 2019), (Rizka, 2016) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hal ini berkaitan dengan analisis statistic deskriptif yang menunjukkan hasil statistic deskriptif, pajak daerah keseluruhan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten memperoleh rata-rata dengan persentase 24.15%. Pajak daerah tertinggi diperoleh Kabupaten Tangerang sebesar 2153,66 Miliar Rupiah pada tahun 2019. 2019 sedangkan pajak daerah terendah diperoleh Kabupaten Pandeglang sebesar 37,22 Miliar Rupiah pada tahun 2020.

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian pada tabel 4 dari penelitian ini variabel dana alokasi umum memiliki nilai t-statistik -1.528905, sedangkan nilai t-tabel dengan tingkat probabilitas 0.05, df (n-k) = 29 sebesar 2.0452. Dengan demikian t – statistic dana alokasi umum (-1.528905) lebih kecil dari nilai t-tabel (2.0452), yaitu $-1.528905 < 2.0452$. Nilai Prob. yang dimiliki variable dana alokasi umum sebesar $0.1375 > 0.05$. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variable dana alokasi umum dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD), artinya hipotesis pertama (H2) penelitian ini ditolak. Penelitian ini sejalan dengan (Dian, Sri dan Siska 2016) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hal ini berkaitan dengan analisis statistic deskriptif yang menunjukkan hasil statistic deskriptif, dana alokasi umum keseluruhan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten memperoleh rata-rata dengan persentase 31.80%. Dana alokasi umum tertinggi di peroleh Kabupaten Tangerang sebesar 1231.06 Miliar Rupiah pada tahun 2019 sedangkan dana alokasi umum terendah diperoleh Kota Tangerang Selatan yaitu

sebesar 551.96 Miliar Rupiah pada tahun 2021. diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2018 – 2021.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa *Random Effect Model* yang cocok untuk mengestimasi atau melihat variable apa saja sebagai determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian variable pertama menunjukkan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai t -statistic sebesar $10.65506 > t - \text{tabel } 2.0452$. Dengan tingkat signifikansi 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05. Artinya, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pembayaran pajak daerah, maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan meningkat.
2. Hasil pengujian variabel kedua menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh negatuf tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai $t - \text{statistic}$ sebesar $-1.528905 < t - \text{tabel } 2.0452$. Dengan tingkat signifikansi 0.1375 atau lebih besar dari 0.05. Artinya, besar atau kecilnya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa data variabel X3 atau Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya keterkaitan atau hubungan dengan variabel Y atau Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Fauzi, A., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Aulia, T. Z. (2022). PENGARUH ENVIRONMENT DISCLOSURE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE TERHADAP ECONOMIC PERFORMANCE. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 4(4), 01-15.
- Firdousy, A. M., Abbas, D. S., Rahandri, D., & Siregar, I. G. (2022). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT HUTANG, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT TERHADAP PERSISTENSI LABA. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 1(4), 44-56.
- Fitriyanti, R. (2020). Pengaruh Fixed Assets Intensity, Ukuran Perusahaan, Chief Officer Expert Power dan Chief Financial Officer Political Power Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Pada BEI Periode. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Azzahra, H. N., Hasanah, K., & Abbas, D. S. (2021, June). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis* (pp. 404-416).
- Dewi, R. P., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Rachmania, D. (2022). PENGARUH HUTANG, KEPEMILIKAN SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 01-10.
- Fikri, M., Abbas, D. S., & Zulaecha, H. E. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Finansial Distress, Dan Ukuran Perusahaan. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 1(3), 87-107.
- Abbas, D. S., Ismail, T., Taqi, M., & Yazid, H. (2021). The influence of independent commissioners, audit committee and company size on the integrity of financial statements. *Studies of Applied Economics*, 39(10).
- Setiadi, I., Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2023). Karakteristik perusahaan, komisaris independen dan pengungkapan sustainability reporting. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1).
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, CIR, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di BEI 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2177. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p20>
- Suripto. (2020). Intensitas Modal Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 15(1), 33-44.
- Syamsuddin, M., & Suryarini, T. (2019). Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Manajerial

- Terhadap *Etr.Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 180.
<https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.5950>
- Tholibin, S., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Hidayat, I. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 33-40.
- Prianti, A., & Abbas, D. S. (2022, January). Pengaruh Kualitas Auditor dan Komite Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (No. 4, pp. 313-318).
- Abbas, D. S. (2019). Pengaruh Likuiditas, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress (Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013-2016). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(2), 119-127.
- Afrina, I., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Mubbarok, A. Z. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, KOMISARIS INDEPENDEN, CAPITAL INTENSITY DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4), 71-91.
- Amelia, R., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Hakim, M. Z. (2022). PENGARUH KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN, JENIS INDUSTRI, PROFITABILITAS KLIEN, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP FEE AUDIT. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 205-223.
- Anugrah, S., & Yuliana, C. (2021). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17(1), 82–100.
<https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2013>
- Abbas, D. S., Ningsih, W., & Susilawati, S. (2021). ECONOMIC PERFORMANCE PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2.
- Abbas, D. S., Rahandri, D., Kismanah, I., & Ardiyanti, A. (2022). Competitive Advantage as Role Moderation Between System-Driven Performance and Economic Performance. *Quantitative Economics and Management Studies*, 3(2), 235-244.
- Aprianti, D., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Basuki, B. PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN: XXXX-XXXX, Hal 01-13 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN.
- Dian Budi, S. & S. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi pada kota/kabupaten di provinsi jawa barat tahun 2010-2014). 3(3), 3308-3314.

- Putri Ika Sari. (2015). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studikusus pada kabupaten/kota di diy periode 2007-2014).
- Kamilaus, F & P. (2020). Analisis kemandirian keuangan daerah kabupaten belu. 5(2), 1-6.
- Kurnia Rina, G. A. P. (2004). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 364-369.
- Rina,a. (2010). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort (studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota wilayah eks karesidenan surakarta).
- Maya &Lita N. (2019). Pengaruh pajak, retribusi, dbh, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. 3(2).
- Rizka Lutfia Novalista. (2016). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten atau kota di provinsi jawa tengah. 2(2).
- Arryeksandy, M & E (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal (pada pemerintah provinsi banten periode 2011-2015).
- Biduri, S. 2018. Buku ajar akuntansi sektor publik. Cetakan pertama. Penerbit umsida press.sidoarjo.
- Hs Sugiyono& A Musfirati. (2021). pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 5(1).
- Muhajir, Ahmad (2018). Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten pandeglang.
- Eksandy, A.(2018). Metode penelitian akuntansi dan manajemen. Tangerang.
- Republik Indonesia.2004. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.jakarta.
- Republik Indonesia.2004. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuanganantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.jakarta
- Republik Indonesia.2014. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.jakarta.
- Republik Indonesia.2000. Undang – undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah.jakarta.
- Republik Indonesia.1945. Undang – undang dasar 1945 pasal 33 tentang kekayaan alam.jakarta.
- Republik Indonesia.2009. Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.jakarta.

Republik Indonesia.2004. Undang – undang nomor 33 pasal 1 angka 21 tahun 2004 tentang dana alokasi umum.jakarta.

Republik Indonesia.2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang kebijakan dalam pengalokasian dana alokasi umum.

Republik Indonesia.2004. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang besaran dana alokasi umum.Jakarta.

Website <https://ekonomi.bisni.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi>, diakses pada 26 Maret 2022.

Website <https://mediaindonesia.com/ekonomi/452201/penerimaan-daerah-dari-pajak-dan-retribusi-diprediksi-naik-50-saat-ruu-hkpd-berlaku-efektif>, diakses pada 20 April 2022.

Website <https://bisnis.tempo.co/read/1505585/sri-mulyani-soroti-dana-alokasi-umum-untuk-daerah-habis-buat-belanja-pegawai/full&view=ok>, diakses pada 20 Maret 2022.

Website <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/928>, diakses pada 18 Mei 2022.